

PANDANGAN INTELEKTUAL TERHADAP WACANA KYAI PENDUKUNG KHOFIFAH INDAR PARAWANSA DALAM KONTESTASI PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR 2018

Yoky Armando Sunaryo

(S1 PPKn, FISH, UNESA) yokysunaryo@mhs.unesa.ac.id

Oksiana Jatiningsih

(PPKn, FISH, UNESA) oksianajatiningsih@unesa.ac.id

Abstrak

Berbeda dengan sebelumnya, kyai yang selama ini tidak mendukung perempuan menjadi pemimpin, beberapa di antaranya menjadi pendukung Khofifah dalam pencalonannya menjadi gubernur Jawa Timur di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018. Tentu saja hal ini menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Apakah perubahan ini menandai terjadinya transformasi nilai gender dari patriarkhi menjadi egalitarian? Dalam bahasa Foucault apakah telah terjadi patahan atau keterputusan dominasi wacana nilai gender patriarkhi yang selama ini mendominasi kehidupan? Menjadi menarik untuk mengaji bagaimana para intelektual melihat fenomena ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pandangan intelektual tentang wacana kyai pendukung Khofifah Indar Parawansa dalam kontestasi pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2018. Ada sembilan orang intelektual yang menjadi informan penelitian, yang diambil berdasarkan bukti-bukti bahwa yang bersangkutan merupakan intelektual yang memiliki pemahaman di bidang politik-keagamaan yang berkaitan dengan gender, serta terlibat aktif sebagai konsultan politik, pakar, dan peneliti yang sekaligus memiliki pengetahuan tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018. Fokus penelitian ini adalah pandangan intelektual tentang fenomena kyai pendukung Khofifah Indar Parawansa di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018, yang dapat dicermati dari pendapat dan pandangan yang diturkannya. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Data diambil dengan menggunakan wawancara mendalam dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) dukungan kyai kepada Khofifah Indar Parawansa bukan berdasarkan kesadaran untuk memperjuangkan kesetaraan gender, namun berdasarkan kepentingan politik. (2) strategi dan kalkulasi politik kyai berbasis pada kesamaan *value*. (3) patriarkhi masih menjadi *dominant discourse*, sehingga tidak terjadi diskontinuitas wacana gender patriarkhi, meskipun Khofifah Indar Parawansa terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur.

Kata Kunci: Kyai, Wacana, Patriarkhi, Khofifah Indar Parawansa.

Abstract

In contrast to the previous kyai who have not supported women to become leaders, some of whom have supported supporter of Khofifah in her candidacy for governor of East Java in the 2018 Governor and Deputy Governor Elections. Of course this is an interesting phenomenon to study. Does this change mark the transformation of gender values from patriarchy to egalitarian? In Foucault's language has there been a break or break in the discourse of patriarchal gender values that have dominated life? It is interesting to study how intellectuals view this phenomenon. Therefore, this study aims to reveal intellectual views about the discourse of kyai supporters of Khofifah Indar Parawansa in the contestation for the 2018 East Java governor election. There were nine intellectuals who became informants of the research. Which were taken based on evidence that the person concerned was an intellectual who in the political-religious field related to gender, as well as being actively involved as a political consultant, and researcher who at the same time has knowledge of the 2018 East Java Governor and Deputy Governor elections. The focus of this research is an intellectual view of the phenomenon of kyai support Khofifah Indar Parawansa in the 2018 East Java Governor and Deputy Governor elections, which can be observed from the opinions and view he expressed. Data collection techniques with in-depth interviews and documentation. Data were taken using in-depth interviews and then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that (1) kyai's support for Khofifah Indar Parawansa is not based on awareness to fight for gender equality, but based on political interests. (2) Political strategies and calculations based on similarity of values. (3) Patriarchy is still the dominant discourse, so there is no discontinuity in patriarchal gender discourse, even though Khofifah Indar Parawansa was elected as Governor of East Java.

Keywords: Kyai, Discourse, Patriarchy, Khofifah Indar Parawansa

PENDAHULUAN

Reformasi 1998 merupakan transisi keluarnya Indonesia dari otoritarianisme menuju demokrasi. Seiring dengan hal tersebut berbagai diskursus mulai menyeruak, tidak

terkecuali diskursus tentang perempuan. Jika diamati dari beberapa kejadian agaknya benar retorika berbasis keberpihakan pada perempuan dilakukan setengah hati, "Reformasi" malah menjadi "deformasi." Hal ini disebabkan demokrasi yang sejatinya "bersandar" pada

kebebasan dan kompetisi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh perempuan karena perempuan tidak dipersiapkan untuk menghadapinya. Fenomena tersebut dapat dibuktikan dengan tidak dibedakannya pembinaan antara kader perempuan dan laki-laki dalam partai politik (Rafni, 2015:283). Padahal, menurut Squires (2000) melalui bukunya yang berjudul *Gender in Political Theory* menyebutkan diperlukannya perlakuan khusus bagi perempuan di ranah politik agar ia keluar dari marginalitasnya. Strategi pembinaan dilaksanakan secara reguler dan insidentil yang diarahkan pada militansi kader terhadap partai, sehingga tidak sistematis dan terkesan hanya untuk formalitas belaka (Rafni, 2015:283).

Setidaknya ada tiga alasan mengapa partisipasi politik perempuan tetap saja marginal. *Pertama*, rendahnya pendidikan politik untuk perempuan. *Kedua*, budaya patriarkhi yang memarginalkan perempuan masih mendominasi politik. *Ketiga*, pemerintah pasca-Soeharto bermuka dua dengan cara mencari perhatian pada komunitas internasional dengan mendukung nilai-nilai demokrasi liberal, namun pada saat yang sama merayu elektoral domestik, termasuk unsur-unsur konservatif dan komunal tradisional dengan cara membiarkan melakukan apa saja di tingkat lokal (Suryakusuma, 2012:85).

Tatanan patriarkhi di tingkat lokal ini juga hadir di lingkungan pesantren. Terjadi dialog yang *alot* antara perspektif gender dengan perspektif Islam, terutama fiqh klasik. Di lingkungan pesantren, kyai (laki-laki) seolah menjadi pemain tunggal yang sepenuhnya didukung oleh jaringan kekerabatan, intelektual, dan simbolik para kyai yang terjalin lintas pesantren dan lintas generasi para pimpinannya (yang lebih dikenal dengan istilah *gus*). Dalam hal ini, nyai tidak mendapatkan tempat bersama hilangnya perhatian pada isu gender (Dhofier, 1982:21).

Setidaknya ada tiga pandangan untuk memahami kondisi ini. *Pertama*, pesantren adalah lembaga sosial yang diciptakan, dijalankan, dan dikembangkan oleh laki-laki dengan kyai sebagai kontributor utamanya. *Kedua*, posisi dan peran perempuan dalam dunia pesantren dianggap tidak penting, subordinat, atau tidak relevan. *Ketiga*, pesantren-pesantren dipandang tidak menghasilkan implikasi sosial-politik yang khusus bagi kehidupan perempuan dan merugikan perempuan, maka hal itu dianggap tidak penting bagi kehidupan sosial-keagamaan pada konteks yang lebih luas (Marhumah, 2010:5-6).

Konstruksi patriarkhi sudah terbentuk sejak di alam pikiran. Misalnya, dalam materi ajar, kitab-kitab populer yang sering diajarkan, seperti kitab *Uqud Al-Lujjain* karya Syaikh Nawawi Al-Bantani dari Tanara, Serang, Banten, yang banyak dibaca di pesantren Jawa mengisyaratkan keberpihakan yang nyata kepada laki-laki dan ketimpangan hak dan kewajiban antara suami dengan istri (Marhumah, 2010:6-7). Menurut kitab ini, kewajiban utama perempuan

adalah melayani suami di ranjang (Bruinessen, 1995:178). Kitab-kitab klasik ini ditulis oleh para penulis laki-laki dan dilestarikan di pesantren yang pada gilirannya mengasumsikan maskulinisasi epistemologi pengetahuan agama (Harding, 1987:181).

Kyai adalah elit sosial yang memiliki pengaruh dalam mengarahkan pandangan dan pilihan hidup masyarakat. Besarnya pengaruh kyai tidak hanya berada di pesantren, namun juga di luar pesantren. Kelebihan lain dari seorang kyai adalah kyai hidup di tengah-tengah masyarakat pengikutnya dan kyailah ulama yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa (Anam, 2010:373). Dengan melihat posisi vital kyai di masyarakat, hampir tidak mungkin kepentingan politik tidak mendekati kyai yang pengaruhnya melampaui batas-batas tempat tinggal dan pesantren yang diasuh.

Harus diakui, reformasi merupakan peristiwa yang menghendaki keterlibatan masyarakat secara langsung, sehingga kyai yang selama Orde Baru tersembunyi di balik tembok-tembok pesantren mulai dicari, baik sebagai *governing elite* maupun sebagai *non governing elite*. Peran besar kyai dalam kancah politik tidak dapat dilepaskan dari dinamika kyai, pesantren, dan politik di Jawa Timur sebagai provinsi “seribu pesantren.” Salah satu wadah untuk menuangkan peran besar kyai khususnya kyai Jawa Timur adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018.

Partai politik mayoritas di parlemen bukan menjadi variabel utama dalam keterpilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018, maka kyai merupakan faktor penting dan utama mengingat Jawa Timur merupakan “Provinsi Seribu Pesantren.” Jawa Timur sebagai basis Islam tradisional (NU) memiliki masyarakat yang hidup dengan guyub rukun dengan pengayoman dan arahan kyai. Sebagai tokoh masyarakat yang dihormati, tidak heran jika para kyai menjadi primadona bagi para kandidat.

Khofifah-Emil didukung oleh beberapa kyai yang dikenal dengan sebutan Tim 9, yaitu K.H. Sholahudin Wahid dari Jombang, K.H. Asep Saifudin Chalim dari Mojokerto, K.H. Mutam Muchtar dari Madura, K.H. Afifudin Muhajir dari Situbondo, K.H. Mahfud dari Gresik, K.H. Yazid Karimulloh dari Jember, K.H. Suyuti Toha, K.H. Hisyam Syafaat, dan K.H. Yusuf Nuris dari Banyuwangi (Tempo, 2017). Dukungan dan komitmen para kyai kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak tidak hanya sekedar ucapan tanpa bukti. Sebagai elit agama yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa pada akhirnya kyai mengeluarkan fatwanya agar masyarakat memilih Khofifah-Emil.

Fatwa tersebut bernomor 1/SFMM/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 yang dideklarasikan di Karongan, Sampang, Madura yang dilanjutkan dengan seruan dan *fatwa fardhu*

'ain nomor 1/SF-FA/VI/2018 tanggal 3 Juni 2018 di Pacet, Mojokerto ditujukan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur untuk memilih Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak pada Pilgub Jatim 2018 (Jatim.co, 2018).

Hal ini esensial untuk dibahas mengingat masih adanya penolakan terhadap pemimpin perempuan. Penolakan tersebut salah satunya datang dari partai politik dan/atau ormas yang berlatar belakang Islam konservatif atas pencalonan Megawati Soekarno Putri pada Pemilu 1999. Dalil yang menjadi acuan yaitu: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kekuasaan (pemerintahan) kepada seorang wanita" (H.R. Bukhari). Selain itu, terdapat ayat Al Qur'an: "*ar-rijalu qoawamuna 'ala an-nisa*" (Q.S An Nisa:34) yang bermakna "lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita" (Fadli, 2017:43-44).

Kyai-kyai Nahdlatul Ulama juga memfatwakan pengharaman atas pencalonan Megawati sebagai presiden perempuan pada Pemilu 2004 (Radar Surabaya, 2004). Fatwa pengharaman tersebut terjadi Kamis, 3 Juni di Pesantren Roudhatul Ulum, Kemesuk, Pasuruan yang dihadiri oleh K.H. Subadar (tuan rumah sekaligus juru bicara), K.H. Abdullah Faqih (Langitan, Tuban), K.H. Sholeh Qasim (Wakil Syuriah PBNU), K.H. Khatib Umar (Jember), K.H. Idris Hamid (Pasuruan), K.H. Anwar Iskandar (Dewan Syura PKB Jawa Timur), dan K.H. Hamid Abdul Mannan (Pamekasan) serta sejumlah kyai di wilayah Jawa Timur. K.H. Subadar yang bertindak sebagai juru bicara menyatakan "Hal ini bukan lagi pro dan kontra, tetapi sudah jelas dalilnya. Boleh saja presiden wanita jika hanya melanjutkan karena ada *coup*. Apabila ada pemimpin wanita terpilih, kyai tidak akan turut menanggung dosanya" (Liputan 6, 2004).

Dominant discourse berupa ketaatan terhadap kyai sulit tergoyahkan. *Image* kyai menjadi pengetahuan dan kebenaran yang dapat memengaruhi seorang untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan anjuran kyai, sehingga pengetahuan dan kebenaran tersebut diterima secara sukarela. Termasuk kultur pesantren yang menempatkan patriarkhi sebagai *dominant discourse*. Namun, pada kenyataannya terjadi diskontinuitas dengan terpilihnya Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur pertama yang berjenis kelamin perempuan dengan dukungan kyai. Kyai memegang peranan penting untuk menentukan haluan politik masyarakat berkultur pesantren karena kepatuhan terhadap kyailah kultur yang tertinggi, termasuk kepatuhan tentang wejangan politik.

Uraian tersebut memunculkan paradoks yang menarik untuk dibahas dan dikaji tentang alasan mengapa Khofifah sebagai pemimpin perempuan di Jawa Timur tidak menemui "pengharaman" atas perempuan sebagai pemimpin dan justru mendapatkan dukungan dari kyai-kyai di Jawa Timur dan terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur. Menariknya, Khofifah bukan merupakan keturunan

langsung dari kyai tersohor dan kharismatik, namun Khofifah justru mampu mengalahkan Saifullah Yusuf yang merupakan seorang laki-laki dan cucu pendiri Nahdlatul Ulama. Patut diduga apakah dukungan tersebut berorientasi pada kepentingan politik, murni pada figur, telah adanya transformasi gender di ranah keagamaan, atau akumulasi dari beberapa alasan tersebut.

Penelitian ini diharapkan mampu menganalisis wacana kyai pada pemimpin perempuan yang belasan tahun lalu dilarang oleh sebagian kyai, namun sekarang justru didukung oleh sebagian kyai di Jawa Timur. Sebagai contoh, ulama kharismatik dari Situbondo K.H. Afifuddin Muhajir menyatakan bahwa "Saya ingin pemberdayaan NU dimulai dari Jawa Timur. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang mampu mengembalikan NU pada masa kejayaannya. Sekurang-kurangnya memiliki tiga peran penting. Pertama, NU sebagai benteng alidah ahlussunnah wal jamaah. Kedua, NU sebagai pengawal moral. Ketiga, NU sebagai penyangga NKRI" (Merdeka.com, 2018).

Jawaban atas motif sekaligus wacana dari para kyai yang mendukung Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur memang dibutuhkan. Setidaknya, ada tiga alasan mengapa para intelektual diberi kepercayaan tersebut, yaitu: (1) Intelektual tidak bergantung pada atasan yang berhak memonopoli perkataannya, (2) Mampu menyuarakan pemikiran alternatif (Suseno, 2014), (3) Intelektual memiliki peran membentuk *civil society* yang merupakan syarat untuk sistem yang demokratis (Abdillah, 2015:279). Begitu penting dan dipercayanya intelektual dalam peradaban pemikiran masyarakat Indonesia, sehingga sering argumentasinya dijadikan *headline* media cetak.

Seorang intelektual dapat mengungkapkan hal-hal yang tidak berani diungkapkan oleh politisi, sehingga intelektual memiliki tempat yang istimewa di masyarakat. Intelektual adalah seseorang yang dianugerahi bakat untuk mengekspresikan, merepresentasikan, dan mengartikulasikan pandangan, sikap, pesan, filosofi, dan pendapatnya kepada publik (Said, 2014:8). Salah satu keahlian intelektual adalah kepandaian membungkus pendapat secara abstrak-teoritis atau dalam kajian ilmiah, namun pembaca tetap mengetahui apa yang dimaksud. Perhatian kepada intelektual memang tidak berlebihan karena intelektual merupakan salah satu pihak yang mampu menyuarakan pandangan dan pikiran alternatif.

Kuantitas bukanlah menjadi yang utama, namun kualitaslah yang diutamakan. Itulah sebabnya, intelektual sangat jarang ditemui. Intelektual merupakan pencipta tatanan peradaban masyarakat karena yang dijunjung adalah standar keadilan dan kebenaran. Intelektual sejati adalah seorang yang aktivitasnya didasarkan bukan untuk mencapai tujuan praktis, tetapi yang menemukan kepuasan

dalam mempraktikkan ilmu pengetahuan atau seni (Benda, 1980:43). Peran intelektual sangat dibutuhkan guna menyibak sesuatu yang terlupakan, menjelaskan koneksi yang disangkal dan menyajikan alternatif pikiran (Said, 2014:18).

Kebenaran yang diungkapkan intelektual berdasarkan ilmu yang digelutinya, bukan kebenaran asal-asalan, apalagi yang berlandaskan pada *pseudo-truth*. Detail yang disorot oleh intelektual bahkan merupakan persoalan yang dilupakan atau disembunyikan, namun menyangkut hajat hidup semua orang.

“The most important thing in performing political role for the intellectuals should be fulfilling political duties and calls this “the politics of truth” and “the regime of truth.” Foucault implies that every society has intellectuals who should convince populace about the difference between true and false, that is between the announces of politics, what kind of sanctions, methods and procedures they use and what the truth really is. He calls this “the regime of truth in general politics of truth.” According to him, truth should be produced under the control of intellectuals” (Karpova, Meshcheryakova, dan Chudinova, 2016:2).

“Yang paling penting dalam menjalankan peran politik bagi kaum intelektual harus memenuhi tugas politik dan menyebutnya “politik kebenaran” dan “rezim kebenaran.” Foucault menyiratkan bahwa setiap masyarakat memiliki intelektual yang harus meyakinkan masyarakat tentang perbedaan antara benar dan salah, yaitu antara pengumuman politik, sanksi apa, metode dan prosedur yang digunakan dan apa yang sebenarnya terjadi. Foucault menyebut ini “rezim kebenaran dalam politik kebenaran umum.” Menurutnya, kebenaran harus diproduksi di bawah kendali kaum intelektual” (Karpova, Meshcheryakova, dan Chudinova, 2016:2).

Pada dasarnya, intelektual bukan merupakan pencipta kedamaian dan konsensus. Oleh karena itu, intelektual sering berhadapan dengan ortodoksi dan dogma, yang religius ataupun politis yang dikawal oleh para “penjaga teks dan visi suci.”

Pengetahuan dan pandangan terhadap kebenaran inilah yang menuntun intelektual untuk terlibat mengamati persoalan politik dengan tetap menjaga jati dirinya sebagai seorang intelektual yang tetap kritis. Hal ini karena melalui politik, kekuasaan dikelola, dan di dalam kekuasaan, kemanusiaan harus terselenggara. Keterlibatan mengamati dan mengkritisi kekuasaan inilah yang membuat intelektual tidak hanya “berumah di atas angin dengan bangunan menara gading singgasana keintelektualannya.” Intelektual juga diperlukan mengamati kekuasaan semata-mata demi mencari alternatif dan terobosan implementatif bagi berbagai persoalan kebangsaan (Keraf, 2019:284). Munculnya pameo bahwa intelektual merupakan “pencipta bahasa yang mengatakan kebenaran kepada penguasa”

sudah jamak didengar. Seorang intelektual akan mengatakan kebenaran dan keadilan tidak peduli sesuai atau tidak dengan para penguasa, *get away with it*. Untuk itulah para intelektual dilibatkan untuk mengkaji pertarungan wacana berkaitan dengan didukungnya Khofifah Indar Parawansa oleh para kyai.

Penelitian ini menggunakan teori arkeologi pengetahuan yang dikemukakan oleh Michel Foucault. Ada dua alasan mengapa teori dari Foucault yang dipilih. Pertama, keberpihakan Foucault untuk melawan ketidakadilan (dominasi) selaras dengan semangat penelitian ini. Kedua, Foucault menolak *grand narrative theory*, sehingga kajiannya berangkat dari kekuatan mikro atau individual (Sarup, 2011:91). Di tengah kuasa wacana dominan, individu masih berpeluang untuk keluar dari dominasi tersebut, dan itu berarti Foucault memberi ruang kepada individu untuk berbeda dan keluar dari dominasi pengetahuan/kebenaran (Jatiningsih, 2016:25).

Dominant discourse menjadi pemenang dari pertarungan antar-wacana, sehingga pengetahuan dan kebenaran yang diciptakan menjadi kekuatan untuk mendikte dan menguasai individu sesuai dengan kehendaknya. Setiap rezim kekuasaan selalu mempunyai kesempatan untuk menentukan kebenaran melalui pengetahuan yang dibangun. Namun secara khusus, Foucault berfokus pada hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan bahwa tidak ada subjek dalam kekuasaan dan kekuasaan tersebar dan mekanismenya tumbuh dari bawah. Kendati demikian, ada hukum modalitas penyampaian yang menentukan posisi seseorang dalam menyampaikan pernyataannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif eksploratif. Penelitian naratif eksploratif merupakan penelitian yang berupaya untuk menggambarkan atau memaparkan fenomena yang belum memiliki peta atau arah penjelasan tentang fenomena yang dihadapi dan hasil penelitian disampaikan secara naratif dan kronologis. Penelitian naratif eksploratif melakukan penjajakan dan pengenalan terhadap gejala tertentu berkaitan dengan kehidupan individu atau kelompok yang diteliti. Tujuan dari penelitian eksploratif yaitu mencari dan merumuskan masalah-masalah dari suatu fenomena (Mudjiyanto, 2018:66-67).

Tabel 1 Informan Penelitian dan Pertimbangan

No	Informan Penelitian	Pertimbangan
1	Dr. Ayun Maduwinarti, M.P	Ketua Pusat Studi Gender dan Anak Universitas 17 Agustus Surabaya
2	R. Mustofa Quraisy, S.Pd.,M.A	Dosen Universitas Nahdlatul Ulama dan Candidate Ph.D

		National Dong Hwa University, Taiwan
3	Dr. Mutimmatul Faidah, S.Ag., M.Ag	Dosen dan Ketua Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Negeri Surabaya
4	Yudo Adianto Salim, S.H., M.H.	Direktur Eksekutif Jatim Institute
5	Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H	TPD-DKPP Jawa Timur dan Ketua Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan Universitas Negeri Surabaya
6	Awang Dharmawan, S.Ikom., M.A	GP Ansor Jawa Timur dan Wasekjend Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi Jawa Timur
7	Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si	Dosen dan Kepala Pusat Studi Perubahan Sosial dan Media Baru Universitas Negeri Surabaya
8	Wiwik Afifah, S.H., M.H	Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi Jawa Timur dan Asosiasi Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak Indonesia
9	Airlangga Pibadi Kusman, Ph.D	Dosen Universitas Airlangga dan CEO The Initiative Institute

Ada sembilan orang intelektual yang menjadi informan penelitian (lihat tabel 1). Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini adalah teknik sampling secara *purposive*, berdasarkan pada bukti-bukti bahwa yang bersangkutan merupakan intelektual yang memiliki pemahaman di bidang politik-keagamaan yang berkaitan dengan gender. Terlibat aktif sebagai konsultan politik, pakar, dan peneliti yang sekaligus memiliki pengetahuan tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018. Menyesuaikan bentuk pendekatan kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi.

Lokasi yang digunakan di penelitian ini adalah di Surabaya, khususnya di Perguruan Tinggi yang ada di Surabaya. Dipilihnya lokasi tersebut karena keterbatasan akses penelitian yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Namun, jika ada informan yang berada di luar Surabaya akan tetap dilakukan pengumpulan data melalui telepon. Perguruan Tinggi yang ada di Surabaya dipilih karena mayoritas di tempat tersebut terdapat para intelektual yang akan menjadi informan penelitian.

Fokus penelitian ini adalah pemikiran intelektual tentang wacana kyai mendukung Khofifah Indar Parawansa di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018. Hal ini dapat dicermati dari kata-kata atau pernyataan atau ungkapan yang dikemukakan informan tentang kyai pendukung Khofifah dalam pemilihan gubernur 2018.

Menyesuaikan bentuk pendekatan kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi. Data selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga dapat ditemukan tema-tema yang mencerminkan analisis intelektual terhadap persoalan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kyai adalah Penggerak Massa yang Efektif bagi Khofifah Indar Parawansa

Kyai sebagai tokoh agama Islam yang merupakan agama mayoritas, sejak sebelum kemerdekaan sampai pasca reformasi kyai memiliki peran yang sangat penting dan strategis sebagai pemimpin umat. Keunikan masyarakat Indonesia yang berpatron kepada kyai telah memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada kyai. Kyai sebagai tokoh yang dihormati dan disegani memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat, terutama masyarakat di daerah-daerah tertentu. Kyai sangat diperhitungkan sebagai pemimpin umat untuk melawan ketidakadilan para penjajah karena para kyai dianggap sebagai penerus para nabi yang mengajarkan ajaran Allah. Indonesia sebagai sebuah bangsa memiliki keunikan dengan dipercayainya tokoh sebagai tempat bersandar yang ucapan dan nasehatnya ditaati oleh masyarakat, salah satunya kyai. Kyai sebagai tokoh umat Islam yang memiliki akhlak dan sikap yang terpuji, sehingga kyai mendapatkan kehormatan dan menjadi panutan bagi masyarakat. Hal tersebut selaras dengan yang diucapkan Mutimmatul Faidah.

“Kita tahu Indonesia itu unik, masyarakat Indonesia itu tidak bisa lepas dari peran tokoh, termasuk di situ adalah peran tokoh agama. Kita tahu bahwa mayoritas bangsa Indonesia itu muslim sehingga kemudian peran tokoh agama yang terwakili dalam nama atau profil kyai begitu luar biasa dan sangat berperan. Artinya gini, peran kyai itu tidak hanya pada masa reformasi, bahkan pada masa kemerdekaan itu kyai yang ada di Indonesia itu kan kyai yang NKRI.” (Wawancara, 5 Desember 2020)

Jarak antara kyai dengan pemerintah secara tidak langsung berimplikasi pada dekatnya hubungan kyai dengan masyarakat. Masyarakat di masa Orde Baru menjadikan pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian yang tidak terlalu membutuhkan peran pemerintah. Sedangkan, kyai hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai pencerah yang mengajarkan rasa syukur kepada Allah SWT, salah satunya rasa syukur terhadap hasil pertanian. Daerah agraris dengan kultur agamis-tradisional sangat terpengaruh dengan nasehat kyai. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Airlangga Pribadi Kusman.

“Kyai itu sebetulnya kan tokoh masyarakat yang menjadi panutan, menjadi figur sentral terutama di

wilayah-wilayah masyarakat yang corak produksinya agraris yang kemudian identitas keagamaan berbasis NU nya itu kuat.” (Wawancara, 26 November 2020)

Masyarakat dengan kultur keagamaan yang kental memberikan peran yang besar untuk kyai dengan menyandarkan hidupnya kepada kyai sebagai rujukan. Seiring berjalannya waktu, reformasi dengan demokrasiya juga turut mengundang kyai untuk keluar dari tembok-tembok pesantren guna mendiseminasikan keilmuannya secara kontekstual. Era reformasi dengan segala keterbukaannya memungkinkan terjadinya perkembangan media yang semakin beragam dan wacana yang semakin beragam pula. Ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Wiwik Afifah.

“Kyai sebagai tokoh agama berfungsi sebagai penjaga kemurnian ilmu-ilmu agama, maka fungsi kyai sesungguhnya adalah memberikan *advice* berbasis nilai agama pada kondisi yang terkini dan kontekstual.” (Wawancara, 17 Desember 2020)

Nasehat kyai sebagai pemegang otoritas keagamaan mampu untuk memengaruhi cara berpikir dan bertindak dari masyarakat. Kontekstualisasi kehidupan masyarakat di era reformasi tidak hanya menyangkut urusan keagamaan, namun menyangkut urusan politik. Sekali lagi, kyai menjadi patron masyarakat untuk menyandarkan pilihan politiknya. Daerah-daerah yang memiliki basis keagamaan yang kuat masih menjadikan arahan kyai sebagai pertimbangan utama untuk menentukan pilihan politiknya. Seperti yang diungkapkan Ayun Maduwinarti.

“Hal itu akan semakin tampak jelas di wilayah-wilayah yang masih kental dengan nuansa agama misalnya di daerah Madura atau di daerah tapal kuda/pandalungan. Kyai pasca reformasi lebih terbuka dengan persoalan di luar pesantren, termasuk politik.” (Wawancara, 11 Desember 2020)

Kyai pada era reformasi dimungkinkan memiliki peran yang lebih besar daripada hanya sekedar mengasuh santri dan memimpin pondok pesantren. Dukungan kyai kepada kandidat merupakan syarat utama agar para santri dan masyarakat yang dekat dengan kultur pesantren juga turut mendukung kandidat. Kyai pasca reformasi dimungkinkan untuk memobilisasi massa yang beranggotakan para santri dan alumni pesantren agar menjatuhkan pilihan politik kepada kandidat yang telah didukung oleh kyai. Politik menjadi salah satu bidang kehidupan yang menantikan sinar terang kyai agar nilai-nilai kebenaran tetap hidup dan mengilhami para aktor-aktor politik. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Awang Dharmawan.

“Ketika ulama atau kyai memiliki *sanat* ilmu yang kuat melihat politik itu memiliki dasar, misalnya seperti K.H. Maimoen Zubair yang aktif di PPP karena memiliki alasan bahwa politik itu bukan dianggap sebagai suatu wilayah yang menjijikkan atau kotor, tetapi bagaimana dia ingin berada di

suatu sistem dan kyai itu sebagai *supporting system*, sehingga tidak semakin melenceng perilaku aktor politiknya.” (Wawancara, 8 Desember 2020)

Kyai dengan keilmuan yang kuat akan cenderung berada di tengah para aktor dan elit politik sebagai peniup peluit ketika politik menjauh dari kebaikan dan kebenaran. Elit politik memiliki keyakinan bahwa untuk mendapatkan suara di daerah yang agamis diperlukan keterlibatan kyai untuk menyosialisasikan yang diinginkan elit politik. Kebutuhan untuk meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pertarungan politik guna memenangkan pemilihan umum pada akhirnya menuntun para elit politik untuk melibatkan kyai. Keterlibatan kyai dalam memberikan dukungan kepada kandidat dianggap menguntungkan karena para santri dan alumni pesantren akan *sami'na wa atho'na* terhadap pilihan politik kyainya. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Yudo Adiinto Salim.

“Peran dan fungsi kyai dalam politik pasca reformasi adalah memberikan doa restu dan dukungan dengan harapan para santri dan alumni pesantren patuh terhadap *dawuh* kyai. Kultur politik di Jawa Timur dengan banyaknya pesantren memberikan ruang kepada elit politik untuk mendapatkan dukungan dari santri dan alumni pesantren hanya dengan merangkul kyai.” (Wawancara, 13 November 2020)

Ketaatan kepada kyai dari santri dan alumni pesantren dimanfaatkan oleh para elit politik agar dukungan kyai kepada kandidat juga diikuti oleh para santri dan alumni pesantren. Karena itu, dukungan kyai kepada kekuasaan dianggap penting sebagai dukungan sosio-religius yang dapat menjaga kekuasaan dari delegitimasi. Marwah kyai menjadi tameng yang cukup tangguh untuk menghadapi serangan terhadap stabilitas kekuasaan terutama yang berkaitan dengan faktor sosiologis, kultural, bahkan religiusitas. Anggapan ini sesuai dengan yang disampaikan Hananto Widodo. Dikatakannya “Kyai dewasa ini berperan sebagai penjaga legitimasi dari kekuasaan karena memiliki daya tawar yang kuat.” (Wawancara, 27 November 2020)

Kekuatan kyai sebagai tokoh agama Islam yang memiliki dignitas yang diakui masyarakat menjadikan kyai memiliki kedudukan terhormat. Bahkan, dalam kultur santri di Madura *acabis* (sowan) yang dilakukan oleh santri kepada kyai tidak hanya bertujuan untuk sekedar bertemu kyai, namun menjadi momentum bagi santri untuk meminta nasehat, doa dan petunjuk untuk aktivitas tertentu, termasuk politik (Suhaidi dan Sihabuddin, 2020:39). Dihadirkannya kyai sebagai penjaga legitimasi kekuasaan dapat meminimalisir instabilitas kekuasaan. Kekuasaan sangat membutuhkan kyai sebagai agen sosialisasi dari program kekuasaan.

Daya tawar yang kuat tersebut menjadikan kyai sebagai primadona bagi elit politik untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya. Lebih dari itu untuk mengamankan

politik elektoral di Jawa Timur yang didominasi oleh kaum agamis (nahdliyin) sangat rentan untuk mempersoalkan jenis kelamin calon pemimpin. Hadirnya kyai sebagai pendukung Khofifah sangat bermanfaat untuk memenangkan pertarungan wacana diperbolehkan atau tidak diperbolehkannya perempuan menjadi pemimpin dari sudut pandang agama.

Khofifah Lebih Baik daripada Gus Ipul

Keterlibatan kyai dalam politik salah satunya termanifestasikan dalam didukungnya Khofifah Indar Parawansa oleh kyai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018. Kyai sebagai elit agama juga memperbesar pengaruhnya dengan terlibat dalam dunia politik. Itu dibuktikan dengan dikeluarkannya pernyataan dukungan, bahkan fatwa agar masyarakat Jawa Timur memilih Khofifah Indar Parawansa. Meskipun demikian, fatwa yang dan pernyataan yang diucapkan kyai tidak bisa dimaknai hanya sebagai rekomendasi keagamaan semata. Hal tersebut dipertegas oleh Airlangga Pribadi Kusman sebagai berikut.

“Kyai sebagai elit keagamaan tentu memiliki otoritas kemudian mau tidak mau terutama dalam kaitannya dengan fenomena-fenomena politik atau kontestasi politik yang berlangsung, maka kemudian *statement*, fatwa, pandangan-pandangan kyai itu tidak bisa dilepaskan dari aliansi kekuatan-kekuatan politik yang mana kyai menjadi bagian di dalamnya. Kyai dalam mengeluarkan fatwa juga dipengaruhi oleh *political circumstances*.” (Wawancara, 26 November 2020)

Setiap pernyataan dan fatwa yang dikeluarkan oleh kyai memiliki kaitan dengan afiliasi kyai, sehingga ada kalkulasi politik terhadap fatwa yang disampaikan yang berimplikasi pada kandidat yang didukung oleh kyai tersebut. Dukungan para kyai kepada Khofifah Indar Parawansa dilatarbelakangi berbagai hal, salah satunya karena Khofifah Indar Parawansa memiliki *track record* yang baik, kualitas yang mumpuni untuk memimpin Jawa Timur seperti yang disampaikan Ayun Maduwinarti sebagai berikut.

“Seorang pemimpin itu justru dipengaruhi oleh kompetensinya dan *track record*. Secara *track record* bagus dalam arti tidak ada cacat yang mencolok. Kompetensi menjadi alasan utama didukungnya Khofifah....” (Wawancara, 11 Desember 2020)

Khofifah Indar Parawansa memiliki daya tawar yang lebih dengan *track record* yang dimiliki. Tidak tanggung-tanggung, dengan kualitasnya Khofifah tercatat beberapa kali diundang sebagai pembicara di forum-forum internasional dan dipercaya sebagai pimpinan delegasi Indonesia. Kemampuan dan pengalaman Khofifah Indar Parawansa itulah yang diyakini kyai bahwa Jawa Timur akan lebih baik jika dipimpin Khofifah dibandingkan Gus

Ipul karena saat dipimpin oleh Pakdhe Karwo dan Gus Ipul, Jawa Timur dinilai tidak menunjukkan signifikansi yang membanggakan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Mutimmatul Faidah sebagai berikut.

“... kapasitasnya dianggap mampu memajukan Jawa Timur dibandingkan dengan Gus Ipul yang dianggap di dua periode kepemimpinan beliau bersama Pakdhe Karwo tidak menunjukkan percepatan yang luar biasa...” (Wawancara, 5 Desember 2020)

Kualitas dari Khofifah yang mumpuni merupakan harapan baru bagi kyai yang menginginkan Jawa Timur memiliki kemajuan di berbagai bidang karena Gus Ipul dianggap belum mampu untuk memenuhi keinginan tersebut. Gus Ipul sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur dinilai kyai tidak memiliki signifikansi peran untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap kaum nahdliyin. Statusnya sebagai wakil gubernur memang tidak memungkinkan Gus Ipul memiliki kewenangan memutuskan segala kebijakan, namun para kyai tetap menganggap bahwa Gus Ipul belum mampu memperjuangkan nahdliyin dengan segala kepentingan progresifnya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Agus Machfud Fauzi.

“... ada semacam kekecewaan *elite* nahdliyin di Jawa Timur terhadap Gus Ipul selama bersama Pakdhe Karwo. *Elite* nahdliyin tidak melihat bahwa Gus Ipul itu wakil, ketika melihat Gus Ipul kurang maksimal ya karena dia sebagai wakil, tetapi kyai melihat ini banyak kekurangan, sehingga kemudian kyai menampilkan Khofifah.” (Wawancara, 25 November 2020)

Ditampilkannya Khofifah Indar Parawansa sebagai “antitesis” dari Gus Ipul merupakan pilihan politik yang paling realistis jika ditinjau berdasarkan kemampuan dan loyalitas. Khofifah juga salah satu kader terbaik NU yang memiliki konsistensi untuk berkompetisi di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Nahdlatul Ulama dengan segala kulturnya adalah simpul yang dapat menyatukan kyai dan Khofifah. *Value* yang sama tersebut semakin memantapkan para kyai untuk berjuang memenangkan Khofifah Indar Parawansa. Hal ini selaras dengan pendapat R. Mustofa Quraissy yang mengatakan, “... banyak orang yang mendukung calon itu tanpa membaca visi misinya, dukungan politik itu sangat dipengaruhi oleh kesamaan *value* atau pandangan hidup.” (Wawancara, 14 November 2020)

Dukungan berdasarkan kesamaan *value* ternyata lebih membuat kyai dan Khofifah lebih akrab daripada dukungan karena visi misi. Visi misi yang berupa cita-cita tekstual dapat diingkari, sedangkan kesamaan *value* akan sulit untuk diingkari karena selama ini *value* itulah yang memengaruhi cara hidup seseorang. Adanya kesamaan *value* antara kyai dengan Khofifah yang berlanjut dengan kedekatan secara personal dan emosional. Kemudian,

melalui kedekatan secara personal inilah para kyai dengan mantap mendukung Khofifah. Ini sejalan dengan yang disampaikan Awang Dharmawan sebagai berikut.

“Jadi, tidak didukungnya Gus Ipul oleh beberapa kyai karena kyai yang bersangkutan ya memang dekat secara personal ke Khofifah mengingat Khofifah sudah dua kali mencalonkan diri. Artinya, secara social capital dan jaringan politik, dan hubungan komunikasinya dengan basis-basis tokoh masyarakat di Jawa Timur Khofifah sudah memiliki modal. Apalagi ketika maju pada 2018 statusnya Menteri Sosial yang mana program-program yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat pedesaan dan pesantren banyak disupport oleh Khofifah dan itu pasti akan berhubungan dengan isu ekonomi pedesaan atau ekonomi kelas menengah ke bawah yang menjadi *vocal point* oleh NU.” (Wawancara 8 Desember 2020)

Kedekatan secara personal menjadi alasan yang kuat atas didukungnya Khofifah oleh beberapa kyai, sekaligus menjadi alasan tidak didukungnya Gus Ipul oleh beberapa kyai yang pada akhirnya mendukung Khofifah. Kedekatan personal tersebut pada akhirnya melahirkan hubungan patron-klien antara kyai dengan Khofifah Indar Parawansa serta para pendukungnya. Ini merupakan akibat dari rasionalisasi yang ada dengan dipengaruhi oleh kalkulasi politik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Airlangga Pribadi Kusman. Dikatakannya, “... patron-klien dan juga trah politik yang tidak sama.” (Wawancara, 26 November 2020)

Patron-klien yang berbeda membuat dukungan kyai yang ada di Jawa Timur terpolarisasi menjadi dua kutub. Pilihan politik berbasis proses dialektik menjadi alasan dukungan diarahkan kepada Khofifah atau Gus Ipul. Kyai pendukung Khofifah diklaim lebih militan dibandingkan dengan kyai pendukung Gus Ipul karena kyai pendukung Khofifah belum pernah berkuasa. Sedangkan, kyai pendukung Gus Ipul telah stabil dan nyaman berada di kekuasaan selama 10 tahun. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Agus Machfud Fauzi sebagai berikut.

“Gus Ipul sudah memiliki kyai yang berbeda. Kyai pendukung Gus Ipul bukan kyai pendukung Khofifah. Ada banyak pesantren yang belum *diopeni* oleh Gus Ipul yang selanjutnya berkumpul dan membuat kekuatan dan yang bisa diharapkan ya Khofifah.” (Wawancara, 25 November 2020)

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 menghasilkan pertarungan yang sengit antara Khofifah Indar Parawansa dan Gus Ipul karena saat itulah ada kekecewaan yang menggumpal akibat adanya pihak yang tidak terakomodir. Dialektika yang dipadukan rasa kecewa karena teralienasi memberikan dorongan yang kuat untuk membentuk kelompok tandingan. Kekecewaan terhadap kepemimpinan Gus Ipul melahirkan aliansi baru yang menjatuhkan pilihan kepada Khofifah. Tesis ini

sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Yudo Adiinto Salim sebagai berikut.

“Tidak didukungnya Gus Ipul oleh seluruh kyai diakibatkan tidak sejalan dengan visi misi Gus Ipul, komitmen yang tidak ditepati, atau secara hati nurani memang tidak menjatuhkan pilihan ke Gus Ipul. Trah politik juga dapat menjadi alasan tidak didukungnya Gus Ipul oleh para kyai.” (Wawancara, 13 November 2020)

Kemenangan Khofifah Indar Parawansa atas Gus Ipul di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 yang lekat dengan dukungan kyai didapatkan salah satunya karena kekecewaan para kyai kepada Gus Ipul. Akhirnya, dukung mendukung calon bukan atas dasar pertimbangan secara keagamaan, namun berdasarkan kalkulasi dan strategi politik. Dukungan terhadap Khofifah Indar Parawansa oleh para kyai dikarenakan sekian sebab dan alasan yang lebih bersifat politik-kalkulatif. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan R. Mustofa Quraissy.

“... dalam penelitian saya, tidak semua kyai itu kyai. Maksudnya, baiklah kyai punya ilmu, punya pesantren, tetapi tidak semua dari kyai merepresentasikan perjuangan secara murni. Artinya, kyai juga memiliki tendensi atau kepentingan yang lain.” (Wawancara, 14 November 2020)

Kepentingan kyai memberikan dorongan yang kuat atas didukungnya Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur 2018. Kepentingan tersebut bukan sebuah rahasia di dalam politik selama berorientasi pada kebaikan dan kebenaran, namun akan menjadi buruk ketika kepentingan tersebut berbasis pada materi keduniawian apalagi jika ditempuh secara transaksional dengan menggadaikan suara umat. Kesetaraan gender ternyata bukan menjadi sebab dan alasan didukungnya Khofifah Indar Parawansa oleh para kyai meskipun Khofifah Indar Parawansa berjenis kelamin perempuan. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan Wiwik Afifah sebagai berikut.

“Yang jelas bukan karena transformasi gender. 2013 isu gendernya sangat kuat. Kami terlibat di pendidikan politik saat itu yang namanya kampanye “*arrijalu qowwamuna ‘alannisa*” itu sangat kencang sekali. Bagi saya, justru konsep gendernya sedang tidak dipakai, beliau menggunakan netral gender kalau dulu menggunakan buta gender. Kalau saya itu netral gender, netral gender itu tetap patriarkhi. Netral gender itu belum tentu feminis, netral gender itu bisa jadi patriarkhi” (Wawancara, 17 Desember 2020)

Perbedaan 2013 dan 2018 tentang kencangnya isu gender yang ditujukan kepada Khofifah bukan berarti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 telah menunjukkan adanya kesetaraan gender. Netral gender yang digunakan justru meneruskan patriarkhi karena sejak awal perempuan dan laki-laki tidak setara. Artinya, kesadaran untuk memperjuangkan kesetaraan gender oleh

para kyai dalam berpolitik masih belum terjadi walaupun Khofifah Indar Parawansa yang berjenis kelamin perempuan didukung kyai dan telah terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur.

Kyai Berkepentingan Mendukung Khofifah Indar Parawansa

Demokrasi telah dipilih Indonesia sebagai suatu sistem politik yang salah satu tugasnya menjamin hak politik warga negara untuk memilih pemimpinnya melalui pemilihan umum. Pemilihan umum yang dilakukan mestinya menjunjung nilai-nilai kesetaraan, salah satunya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan yang dahulu mengalami domestikasi peran mulai keluar dari domestikasi tersebut dan merambah kerja-kerja politik yang dahulu dikerjakan oleh laki-laki. Salah satu ajang yang memberikan wadah untuk eksistensi perempuan di bidang politik adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018. Pemimpin perempuan yang dahulu menuai perdebatan mulai dimaklumi sebagai akibat dipilihnya demokrasi. Hal ini selaras dengan yang diutarakan oleh Agus Machfud Fauzi, "... pada tahun 2018 berubah bahwa perempuan "diizinkan" oleh kyai untuk memimpin" (Wawancara, 25 November 2020)

Kepemimpinan perempuan yang dahulu dihalangi tembok tebal dalil agama saat ini mulai menuai kabar baik. Diizinkan perempuan untuk menjadi pemimpin melalui kontestasi politik salah satunya dikumandangkan oleh kyai sebagai pemegang otoritas keagamaan yang selama ini dalilnya dijadikan rujukan oleh masyarakat dalam berpikir dan bertindak. Kyai yang pada tahun 2008 dan 2013 masih "mensyaratkan" pemimpin sebaiknya laki-laki mulai melunak dan justru mendukung pemimpin perempuan di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 yang terwakili pada sosok Khofifah Indar Parawansa. Ini sesuai dengan yang disampaikan Mutimmatul Faidah sebagai berikut "... saya yakin kyai itu tidak ada masalah dengan kehadiran perempuan." (Wawancara, 5 Desember 2020)

Khofifah Indar Parawansa yang pada tahun 2008 dan 2013 memperoleh serangan tentang status jenis kelaminnya sebagai perempuan mulai bernafas lega karena pada tahun 2018 isu tersebut relatif tidak tampak. Kyai sebagai *stakeholder* yang memengaruhi dan dipengaruhi kultur pesantren memegang peranan yang penting atas wacana gender berbasis keagamaan, termasuk menentukan bahan ajar yang kelak akan diajarkan kepada para santrinya. Kitab kuning yang menjadi buku ajar di pondok pesantren dianggap menjadi salah satu sebabnya seperti yang disampaikan oleh Agus Machfud Fauzi sebagai berikut.

"Jadi, masih memahami teks-teks agama yang kaku. Bahkan, kalau diterjemahkan dari kitab-kitab kuning, sebagian dari kitab-kitab kuning itu sudah

memperbolehkan perempuan, tetapi ketika tidak ada laki-laki." (Wawancara, 25 November 2020)

Laki-laki lebih diprioritaskan menjadi pemimpin dengan dalil "*arrijalu qowwamuna 'alannisa*." Stigmatisasi atas ayat tersebut seolah ketidakadilan ini bersumber dari Al-Qur'an sebagai sumber primer ajaran Islam, padahal tafsiran dan sanad para penafsir juga perlu diperhatikan. Sikap patriarkhi yang sering ditunjukkan oleh kyai tidak datang dari ajaran Islam, namun berasal dari sanad penulis yang mendapat intervensi dari pendidikan dan kultur penulis kitab. Kitab kuning yang ditulis oleh penulis yang mendapat intervensi patriarkhi akan cenderung menulis kitab yang bertendensi patriarkhi. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Wiwik Afifah.

"Kalau menurut saya, Islam itu ajarannya adil gender, tetapi tafsir yang banyak muncul dan mungkin ada di banyak kitab-kitab yang diajarkan di pesantren itu adalah kitab-kitab yang diantaranya banyak yang tidak adil gender, dominannya kyai patriarkhi. Kitab itu kan siapa penulisnya kita harus melihat sananya. Bagaimana sejarah penulis kitab tersebut kita juga harus mengetahui...." (Wawancara, 17 Desember 2020)

Kelaziman perempuan sebagai pemimpin terjadi di banyak daerah. Jawa Timur dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 dimenangkan oleh Khofifah Indar Parawansa yang justru dilegitimasi oleh kyai yang selama ini dilekatkan dengan kultur pesantren yang patriarkhi. Kultur pesantren yang sedemikian mengakar dengan mudah dapat diubah oleh kyai karena kyai merupakan variabel terpenting yang ada di pesantren. Menurut Hananto Widodo ketaatan para santri kepada kyainya lebih penting daripada kultur pesantren. Dikatakannya, "Karena kultur pesantren adalah kepatuhan terhadap kyai, itu yang terpenting." (Wawancara, 27 November 2020)

Kyai merupakan unsur yang memiliki kewenangan menentukan corak dan arah gerak pesantren. Ketaatan kepada kyai oleh santri dan masyarakat memiliki konsekuensi siapapun yang didukung kyai juga akan didukung oleh santri dan masyarakatnya, termasuk dukungan terhadap pemimpin perempuan. Kyai sebagai sumber dari wacana atau bahkan pelaku wacana sangat dihormati dan memiliki *prestige* yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ayun Maduwinarti, "Jadi, sebenarnya kyailah wacana itu karena ketaatan santri dan masyarakat terhadap kyai, termasuk tentang tidak dipermasalahkannya pemimpin perempuan." (Wawancara, 11 Desember 2020)

Tidak adanya hambatan terhadap pemimpin perempuan atas nama Khofifah Indar Parawansa merupakan akibat adanya legitimasi terhadap pemimpin perempuan oleh kyai. Tidak ada larangan bagi kehadiran perempuan sebagai pemimpin politik untuk menyelesaikan masalah

kebangsaan. Anggapan tersebut dikarenakan peraturan perundang-undangan juga memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan sekaligus memberikan legalitas bahwa perempuan boleh memilih dan dipilih. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Mutimmatul Faidah sebagai berikut.

“Jadi, untuk *counter discourse* saya yakin kyai itu tidak ada masalah dengan kehadiran perempuan, *no problem*. Kalau masalah politik, kesetaraan, perempuan harus eksis, perempuan bisa tampil itu sudah tidak ada masalah dalam koridor politik, walaupun mungkin masih ada *problem* ketika itu dalam pribadi” (Wawancara, 5 Desember 2020)

Penting untuk digarisbawahi pernyataan Mutimmatul Faidah memberikan *clue* bahwa atas nama politik, maka persoalan perempuan menjadi pemimpin yang selama ini diperdebatkan menjadi dibolehkan. Kemenangan kandidat menjadi penting dalam persoalan politik dengan tetap tidak menggeser konstruksi patriarkhi jika hal tersebut berkaitan dengan pribadi masing-masing kyai. Kyai sebagai elemen keagamaan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 tidak melakukan *negative campaign* dengan menjadikan gender sebagai alat untuk menjatuhkan kandidat. Namun, kyai menggunakan netral gender untuk mewujudkan kepentingannya. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh R. Mustofa Quraisy, “Kita harus mengerti bahwa ada kepentingan di balik itu “nggak ngurus gendernya apapun yang penting kepentingan saya tersampaikan” dan fakta di lapangan seperti itu.” (Wawancara, 14 November 2020)

Kepentingan dalam politik menjadi hal yang lumrah bahkan tidak peduli dengan status personalnya. Kyai sebagai subjek politik di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 memiliki kepentingan dan akan terpenuhi jika kandidat yang didukungnya dapat terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur. Oleh karena itu, muncul berbagai narasi untuk dapat memenangkan Khofifah Indar Parawansa. Terbukti dengan dikampanyekannya Khofifah Indar Parawansa sebagai anak dari para kyai. Ini disampaikan oleh Wiwik Afifah sebagai berikut.

“Kyai pada saat itu mengkampanyekan Bu Khofifah sebagai anaknya. Yang saya lihat kemarin itu memang tidak memperdebatkan Bu Khofifah yang perempuan sebagai pimpinan, itu tidak dipakai jadi memang politik banget.” (Wawancara, 17 Desember 2020)

Melalui kampanye Khofifah sebagai anak dari kyai secara semiotik Khofifah taat dan patuh kepada para kyai serta kyai memiliki pengaruh yang besar atas Khofifah sebagaimana seorang ayah sekaligus kepala keluarga dengan anaknya. Perdebatan mengenai diperbolehkan atau tidaknya perempuan sebagai pemimpin tidak terlalu menyeruak karena kyai sebagai pemegang otoritas

keagamaan siap pasang badan terhadap apapun yang terjadi pada Khofifah Indar Parawansa. Oleh karena itu, fatwa yang dikeluarkan di Bendungjati, Pacet dan Karongan, Sampang mendukung Khofifah Indar Parawansa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Agus Machfud Fauzi sebagai berikut.

“... kepentingan politik lebih mendominasi daripada pemahaman keagamaan atau dogma. Dalil, ayat atau hadits pun bisa diterjemahkan sesuai dengan kepentingan politiknya dan bagi masyarakat tradisional itu sangat berpengaruh.” (Wawancara, 25 November 2020)

Penafsiran yang jamak atas dalil, ayat, dan hadits berimplikasi pada terjadinya pertarungan wacana politik dengan menggunakan baju agama. Disampaikannya dalil keagamaan dan fatwa oleh kyai akan memengaruhi pilihan masyarakat, sehingga alasan religiusitas bukan menjadi variabel tunggal atas keluarnya dalil keagamaan dan fatwa oleh kyai. Strategi dan kalkulasi politik juga menjadi alasan di balik munculnya fatwa dan *statement* berbasis keagamaan yang dilontarkan oleh pemegang otoritas keagamaan yang terwakili oleh kyai. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Airlangga Pribadi Kusman.

“Kata kuncinya ada di kalkulasi, pilihan rasional, perspektif *scientific* ilmu politik itu memengaruhi, strategi politik yang dibangun itu yang membuat fatwa kyai juga harus beradaptasi dengan kondisi-kondisi seperti itu.” (Wawancara, 26 November 2020)

Penggunaan dalil agama dalam politik tidak dapat dipahami sebagai variabel independen yang benar-benar berbasis religiusitas. Keterlibatan pakar politik dengan segala strategi dan kalkulasi politik dibutuhkan agar dalil keagamaan dapat menaikkan margin elektabilitas kandidat. Margin elektabilitas itulah yang sering menjadi ukuran sementara yang pada waktunya diharapkan menjadi fakta berupa terpilihnya kandidat. Agaknya kontekstualisasi politik atas dalil keagamaan memang menjadi yang utama daripada mengusung kesetaraan gender sebagai *counter discourse* untuk menggantikan *dominant discourse* yang saat ini diduduki oleh patriarkhi. Keadaan yang demikian menurut Wiwik Afifah juga disadari oleh Khofifah Indar Parawansa.

“Ketika kita bertemu dengan dia diundang makan siang dan seterusnya itu, kami melihatnya pada suatu posisi dia membutuhkan ruang solidaritas untuk dirinya karena dia berada pada hiruk pikuk patriarkhi. Artinya, Bu Khofifah pun sadar bahwa dia berada di lingkungan patriarkhi.” (Wawancara, 17 Desember 2020)

Situasi tersebut pada akhirnya semakin menegaskan bahwa terpilihnya Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur dengan kyai sebagai salah satu pendukung utamanya lebih bertendensi pada kepentingan politik daripada perjuangan melawan *dominant discourse*

yang patriarkhi. Namun, terpilihnya Khofifah Indar Parawansa mulai menunjukkan bahwa buta gender memiliki rasio yang semakin kecil dan mulai bergeser kepada netral gender, meskipun netral gender bukan berarti sudah beranjak dari patriarkhi.

Penting untuk melanjutkan perjuangan gender secara berkesinambungan agar terjadi kenaikan Indeks Pembangunan Gender dan awan gelap ketidakadilan gender segera menyingkir. Ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki mulai digugat seiring dengan wacana *rethinking* kedudukan perempuan. Perempuan sebagai manusia ciptaan Tuhan sudah sepatutnya ditempatkan setara dengan laki-laki dalam konstruksi sosial, budaya, apalagi politik. Salah satu entitas sosial yang mendapatkan sorotan atas wacana ini adalah pesantren dan tentu saja kyai sebagai pimpinan sekaligus pembentuk wacana di pesantren. Kitab kuning sebagai bahan ajar utama di pesantren merupakan salah satu pembentuk pola pikir santri selain wejangan dan titah kyai.

Kitab kuning sebagai bahan ajar di pesantren tidak cukup hanya dijadikan objek pengajian, namun juga perlu dijadikan objek pengkajian. Karya ulama terdahulu penting dipahami secara kontekstual dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan politik penulis kitab kuning. Sebagai karya, kitab kuning dengan segala isinya tidak lantas menjadi kebenaran mutlak, namun juga mencerminkan pendapat umum, budaya, dan kebutuhan pada zaman dan tempat dikarangnya. Hal ini juga berlaku untuk kedudukan perempuan. Kitab klasik ini sebagian besar disusun di abad pertengahan yang belum memiliki tuntutan emansipasi dan dominasi laki-laki atas perempuan masih dianggap wajar, bukan hanya di budaya Islam, tetapi di budaya lain, termasuk Eropa.

Apakah ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki merupakan pendapat pengarang kitab kuning atau memang *inheren* dengan Islam? Telaah akademik Hamilton A.R. Gibb tentang hukum fiqh menyatakan bahwa bab ini tidak berdasarkan atas uraian Al-Qur'an, namun atas hadits-hadits yang mencerminkan budaya suku-suku Arab (Gibb, 1961:233-248). Konsepsi tradisional tentang kehormatan suku ternyata lebih memengaruhi para ahli fiqh, misalnya pendapat Khalifah Umar yang membolehkan laki-laki untuk mengucapkan talak tiga sekaligus. Namun, ketidaksetaraan tersebut terlanjur menjadi wacana atas tafsir dari kitab-kitab kuning.

Kemapanan akan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan menjadi sesuatu yang lazim di masa tersebut, sehingga sanat penulis kitab-kitab kuning yang menjadi bahan ajar di pesantren juga terpengaruh oleh dominasi patriarkhi. *Episteme* yang hidup dan dipelihara pada masa tersebut memungkinkan terjadinya *status quo* berupa ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. *Episteme* sangat terpengaruh oleh kekuasaan dan peradaban yang

pada akhirnya menentukan pengetahuan dan disiplin berpikir yang kelak akan menjadi sebuah kebenaran.

Dalam kancah politik, kyai merupakan salah satu entitas sosial-keagamaan yang memiliki kekuasaan untuk memobilisasi massa. Melalui ketokohan dan kharismanya, kyai memiliki kekuasaan untuk memproduksi wacana pengetahuan dan kebenaran yang memengaruhi masyarakat, kelompok, atau orang lain agar menerima dan melakukan pengetahuan dan kebenaran tersebut secara sukarela, tanpa melalui tindakan represif (Jatiningsih, 2016:62), tetapi melalui normalisasi dan regulasi. Bahkan, afiliasi dan fatwa kyai dapat menjadi strategi politik yang turut menentukan pengetahuan dan kebenaran. Kehormatan dan kepercayaan kyai dapat bertransformasi menjadi kekuasaan untuk memengaruhi santrinya dan masyarakat melalui praktik-praktik sosial dengan posisi strategis yang saling berkaitan (Sarup, 2011:112).

Salah satu aspek yang menarik untuk dibahas adalah tampilnya kyai di kancah politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang pada akhirnya dimenangkan oleh Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak menyuguhkan dramaturgi keterlibatan kyai dapat disaksikan secara gamblang dibandingkan daerah-daerah lain. Kyai menyadari pengaruhnya yang sangat besar untuk menentukan bandul politik Jawa Timur, sehingga dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur mengharapkan dukungan kyai jatuh kepadanya.



Gambar 1 Fatwa K.H. Asep Saifuddin Chalim untuk memilih Khofifah-Emil

Sumber: KampungBerita.id, 10 Juni 2018

Masyarakat menganggap kyai sebagai suksesi para nabi, sehingga pilihan dan pandangan kyai merupakan “jalan surga” bagi masyarakat yang mempercayainya. Kepercayaan masyarakat atas sensasi surgawi yang diberikan kyai membuat masyarakat secara sukarela diarahkan dan dikuasai oleh kyai untuk berpikir dan bertindak sesuai kehendak kyai. Salah satu *privilege* yang melekat pada kyai adalah otoritas untuk mengeluarkan fatwa terkait persoalan ukhrawi dan duniawi, termasuk politik. Fatwa diartikan sebagai “perintah” kyai kepada masyarakat pada kondisi dan situasi yang genting.

Urgensi atas fatwa tersebut semakin “menyeramkan” dengan dipilihnya kosakata dan redaksional yang mampu mengikat masyarakat agar tetap berada dalam kendali kyai. Sebagai contoh, fatwa yang dikeluarkan K.H. Asep Saifuddin Chalim untuk memilih Khofifah-Emil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 mengandung kosakata dan redaksional yang “menyeramkan” berupa pengkhianatan terhadap Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW jika tidak memilih Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Timur.

Savoir seperti ini yang terus diulang dengan mewacanakan bahwa tidak haram untuk memilih Khofifah yang berjenis kelamin perempuan sebagai pemimpin, Khofifah lebih baik dari Gus Ipul, sehingga jika tidak taat terhadap fatwa kyai berarti mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Hal tersebut dilakukan oleh kyai karena kyai menyadari kekuasaannya untuk memengaruhi dan memaksa masyarakat, terkhusus santrinya. Meskipun menurut Foucault kekuasaan yang demikian kurang sesuai, namun *savoir* yang dinarasikan oleh kyai dapat ditaati dan menciptakan pengetahuan baru.

Arkeologi pengetahuan menempatkan *savoir* sebagai objek kajian yang menunjukkan pengetahuan “mendalam” (Foucault, 2004:141; Jatiningsih, 2016:41; Jatiningsih, 2020:34). *Savoir* merupakan *an autonomous domain* dari pengetahuan yang tidak disadari (*unconscious of science*), memiliki aturannya sendiri, bersifat umum (*general knowledge*), tidak bersifat khusus (*particular knowledge*), namun kehadirannya mengatur, membatasi, dan mengarahkan apa yang dipikirkan dan dilakukan individu di masyarakat (Foucault, 1968:21 dalam Jatiningsih, 2016:42). Arkeologi pengetahuan menganalisis tentang wacana yang dibangun, kemudian tersebar dan memengaruhi praktik sosial politik di masyarakat.

Pada titik inilah, terjadi diskontinuitas atas doktrin di kitab-kitab kuning bahwa perempuan boleh memimpin jika sudah tidak ada laki-laki. Secara ekstrem, Michel Foucault menolak konsep sejarah yang selalu mengandaikan rangkaian peristiwa yang terjalin secara berkesinambungan, tertata dengan prinsip kausalitas, dan mengandaikan satu pusat, baik berupa titik tolak maupun titik tujuan. Itulah yang menyebabkan Michel Foucault lebih tertarik terlibat dalam satuan-satuan lokal dan mikroskopis, serta berupaya menemukan dan mengakui kebenaran dalam lokalitas tertentu.

Arkeologi merupakan upaya Michel Foucault untuk mengalihkan kajian sejarah tentang kesatuan menuju pencarian fenomena retakan dan diskontinuitas. Melalui *The Archeology of Knowledge*, Foucault menyatakan:

“In the disciplines that we call the history of ideas, the history of science, the history of philosophy, the

history of thought, and the history of literature (we can ignore their specificity for the moment), in those disciplines which, despite their names, evade very largely the work and methods of the historian, attention has been turned, on the contrary, away from vast unities like “periods” or “centuries” to the phenomena of rupture, of discontinuity” (Foucault, 2004:3-4).

“Dalam disiplin-disiplin yang disebut sejarah gagasan, sejarah ilmu pengetahuan, sejarah filsafat, sejarah pemikiran, dan sejarah sastra (dapat diabaikan kekhususannya untuk saat ini), dalam disiplin-disiplin, terlepas dari namanya, menghindari sebagian besar pekerjaan dan metode sejarawan, perhatian telah dialihkan, sebaliknya, jauh dari kesatuan benar seperti “periode” atau “abad” ke fenomena retakan, diskontinuitas” (Foucault, 2004:3-4).

Foucault memandang di balik kontinuitas pemikiran atau satu aktivitas teoritis terdapat interupsi berupa *epistemological acts and thresholds* yang muncul secara tiba-tiba dan sulit dipahami (Foucault, 2012:17). Arkeologi pengetahuan menjadi penting untuk mengingat sesuatu monumental di masa lalu dan memilahnya, sehingga menjadi totalitas yang terkait. *“Whereas past historical investigations were carried out to look for a discontinuity as an attempt to find out what the knowledge regime (episteme) is in power at certain times (archeology of knowledge)”* (Ningrum, Damayanti, dan Abdurrahman, 2019:26). Arkeologi melihat beragam rangkaian wacana dan berusaha mendeskripsikan kemungkinan terjadinya rangkaian dan dalam tingkat apa wacana dimunculkan. Dalam titik inilah wacana selalu terbuka dengan yang terjadi di masa depan dan tetap mencatat peristiwa di masa lalu. Peristiwa satu dengan lain saling menggantikan yang bukan disebabkan oleh superposisi dan keserentakan.

Berbagai wacana tentang Khofifah sebagai gubernur yang ideal untuk Jawa Timur mulai berseliweran. Kyai memainkan peran ganda sebagai tokoh agama juga sebagai tokoh politik yang turut mengampanyekan kandidat. Kharisma kyai dianggap ampuh sebagai pendulang suara di basis wilayah kyai, jaringan santri, dan alumni pesantren. Sebagai pemenang, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak sangat merasakan kuatnya sumbangsih para kyai pendukungnya. Kyai pendukung Khofifah memiliki loyalitas yang tinggi untuk memenangkan Khofifah dengan mengampanyekan bahwa Khofifah lebih baik dari Gus Ipul. Kualitas dan *track record* menjadi bahan kampanye yang paling sering disampaikan oleh kyai, bahkan ditengarai karena pertimbangan inilah muncul fatwa untuk memilih Khofifah oleh K.H. Asep Saifudin Chalim.

Kumpulan pernyataan para kyai yang mengunggulkan Khofifah Indar Parawansa daripada Gus Ipul merupakan kesatuan wacana. Foucault tidak menyaratkan pernyataan-

pernyataan tersebut bertolak pada keinginan yang mengakibatkan “kesatuan” tersebut, namun berbagai relasi dari beberapa pernyataan atau beberapa kelompok pernyataan yang pada akhirnya menjadi suatu “kesatuan.” Pada titik inilah, wacana berarti sekumpulan pernyataan yang terkait dengan konteks dan aturan-aturan tertentu (Prasisko, 2014:30). Oleh karena itu, arkeologi pengetahuan mengkaji tentang *formation discursive*, yaitu aturan-aturan pembentukan wacana (Anwar, 2020:24).

“Foucault states that one must indicate “in accordance with which rules a discursive practice may form groups of objects, enunciations, concepts, or theoretical choices” (Hetmanski, 2018:16-17). “Foucault menyatakan bahwa seseorang harus menunjukkan “sesuai dengan aturan mana praktik diskursif dapat membentuk kelompok objek, pengucapan, konsep, atau pilihan teoritis” (Hetmanski, 2018:16-17) *Formation discursive* salah satunya dapat ditemukan dari teks-teks di media baik berupa pernyataan dukungan maupun fatwa kyai yang mendukung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. Bagi Foucault, setiap wacana memiliki muatan politis, sehingga dalam wacana selalu terkait dengan relasi kuasa dan kepentingan politik tertentu.

“Power is everywhere; not because it embraces everything, but because it comes from everywhere. And “power”, insofar as it is permanent, repetitious, inert, and self-reproducing, is simply the over-all effect that emerges from all these mobilities, the concatenation that rests on each of them and seeks in turn to arrest their movement” (Foucault, 1978:93)

“Kekuasaan ada di mana-mana; bukan karena mencakup segalanya, tetapi karena kekuasaan datang dari manapun. Dan “kekuasaan”, sejauh itu permanen, berulang-ulang, dan memproduksi diri, hanyalah efek keseluruhan yang muncul dari semua mobilitas ini, rangkaian yang bertumpu pada masing-masing dan pada gilirannya berusaha untuk menahan gerakan” (Foucault, 1978:93)

Kekuasaan sifatnya positif dan produktif, sehingga dimungkinkan untuk dijalankan oleh siapapun dalam kehidupan sehari-hari (Hidayatullah, 2016:182). Berdasarkan data yang ada, fenomena kyai mendukung Khofifah menunjukkan kekuasaan kyai yang sedang bekerja menguasai dan memengaruhi santri dan masyarakat agar mengikutinya. Kekuasaan tidak tersebar sebagaimana dikemukakan Foucault, tetapi kekuasaan itu dimiliki kyai dan kyai menggunakannya untuk mendapatkan tujuannya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari para informan, yang menjadikan kyai mendukung Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur adalah kesamaan *value* yang berakibat pada berbedanya patron-klien, investasi politik oleh para kyai, kekecewaan terhadap Gus Ipul dan Jokowi *effect* karena Khofifah dianggap merupakan lingkaran

dekat Presiden mengingat sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, Khofifah adalah Menteri Sosial. Faktor-faktor tersebut sama sekali tidak menyentuh kesadaran untuk memperjuangkan kesetaraan gender oleh para kyai dan lebih bernuansa politis.

Absennya para kyai memperjuangkan diskursus gender dalam ranah politik meskipun Khofifah merupakan pemimpin perempuan mengindikasikan bahwa konsep netral gender sedang digunakan oleh kyai. Netral gender yang sedang dijalankan oleh kyai untuk mendukung Khofifah bertujuan untuk memastikan dominasi kyai di kancan politik Jawa Timur, sehingga kepentingan kyai tetap dapat tersalurkan. “Power relations are intentional because they are the effect of individual actors pursuing their specific ends” (Haugaard, 2012:77). (Hubungan kekuasaan adalah disengaja, karena hal tersebut merupakan efek dari aktor individu yang mengejar tujuan spesifiknya). Kyai menyadari efek domino pada status “kyai” yang disandangnya, sehingga ada peningkatan daya tawar. Daya tawar inilah yang digunakan oleh kyai untuk mencapai tujuan spesifiknya dengan bantuan kekuasaan.

Jika mengacu pada konsep gigantisme politik, maka dapat dideskripsikan bahwa ketaatan masyarakat kepada Khofifah tidak lebih besar daripada sakralitas kyai terutama di daerah yang menjadi basis massa kyai. Hal ini dibuktikan dengan dikampanyekannya Khofifah sebagai “anak imajiner” dari kyai. Secara semiotik, ini menandakan bahwa ketaatan Khofifah terhadap kyai sama halnya dengan ketaatan anak kepada ayahnya dan kedudukan Khofifah seperti kedudukan anak di dalam keluarga yang tidak lebih tinggi daripada kyai yang diimajinasikan sebagai ayah sekaligus kepala keluarga.

Namun, jika dikaitkan dengan kultur pesantren atau daerah yang menjadi basis massa kyai, maka *counter discourse* akan sulit terjadi karena kerja-kerja kuasa sudah dan sedang berlangsung dengan kuat. Kuatnya patronase masyarakat kepada kyai menyebabkan pemikiran Foucault kurang sesuai. Keberanian untuk memunculkan *counter discourse* bergantung pada hukum modalitas yang ada pada diri kyai yang secara sosio-kultural memiliki status terhormat dan sebagai pemegang otoritas keagamaan.

Setidaknya ada tiga klasifikasi intelektual yang memiliki modalitas untuk menyampaikan kebenaran tersebut, yaitu karena (1) siapa atau status seseorang, (2) kondisi kehidupan dan pekerjaannya (3) asal institusi seseorang (Foucault, 2017:132). Kyai memenuhi kriteria sebagai intelektual yang mampu menyampaikan kebenaran tersebut, sehingga dukungan kyai kepada perempuan yang bernama Khofifah Indar Parawansa merupakan ilusi kesetaraan gender yang dimotori oleh kyai.

Menurut Foucault, kekuatan dan eksistensi pengetahuan dibangun oleh relasi yang dapat melahirkan perbedaan-perbedaan dan diskontinuitas pemikiran.

Serpihan-serpihan pemikiran ini berpeluang menjadi *counter discourse* yang mungkin dapat meminggirkan dan menggantikan wacana lama yang dominan (Jatiningsih, 2016:159). Dalam pandangan gender patriarkhi, kultur kelaki-lakian mendominasi hampir di segala aspek kehidupan, sehingga secara kolektif dan tidak sadar masyarakat melegitimasi dan menerapkan kultur tersebut dalam kehidupannya (Yaqin, 2005:112).

Counter discourse muncul seiring dengan pengetahuan baru individu tentang gender dan perubahan cara pandang masyarakat terhadap gender, dan ideologi gender patriarkhi yang menciptakan ketidakadilan (Jatiningsih, 2016:119). Ada retakan dan patahan pemikiran yang menjadikan praktik sosial dan politik berbeda dari yang sebelumnya dengan diizinkan perempuannya atas nama Khofifah Indar Parawansa menjadi Gubernur Jawa Timur. Namun, bukan berarti terjadi pergantian ideologi karena terpilihnya Khofifah bukan diakibatkan semangat untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Fakta ini mendukung sekaligus mengkritisi arkeologi pengetahuan yang diteorisasikan oleh Foucault.

Dominant discourse yang ada masih tetap patriarkhi dan terpilihnya Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur lebih diakibatkan kepentingan politik dibandingkan tujuan untuk menggeser *dominant discourse*. *Counter discourse* bukan berarti mampu mengalahkan *dominant discourse* yang patriarkhi. Dalam kondisi tertentu, *counter discourse* dimungkinkan mengalahkan *dominant discourse* jika kepentingan politik menghendakinya. Kepentingan politik menjadi tujuan dan *dominant discourse* atau *counter discourse* yang menjadi kendaraannya.

Dengan demikian, patriarkhi masih menjadi *dominant discourse* di dalam ranah politik-keagamaan dengan menempatkan kyai sebagai subjeknya. Terpilihnya Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur 2018 tidak berarti ada pergeseraan wacana yang didominasi oleh patriarkhi, tetapi karena kepentingan politik yang menjadi alasan didukungnya Khofifah oleh para kyai. Bahkan, fatwa memilih Khofifah sebagai senjata andalan kyai tidak bisa semata-mata hanya dipengaruhi oleh religiusitas, namun juga menjadi bagian dari strategi politik dengan mempertimbangkan kalkulasi politik.

Ada dua perspektif untuk memotret keterlibatan kyai dalam kancah politik. Pendapat pertama menganggap keterlibatan kyai merupakan sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan bahkan keterlibatan kyai dalam politik dianggap sebagai momentum untuk mengaktualisasikan nilai-nilai agama dalam ruang publik. Alasan lain yang sering dilontarkan terkait keterlibatan kyai dalam politik adalah sebagai wujud kontribusi dan pengabdian kepada Indonesia. Keterlibatan kyai dalam kontestasi politik elektoral baik sebagai *governing elite* maupun *non*

governing elite tidak lantas mereduksi peran kyai sebagai penjaga moralitas umat.

Sedangkan, pendapat yang berbeda menganggap keterlibatan kyai sebagai keberpihakan partisan untuk mendukung kandidat dapat mengurangi dan merusak kehormatan kyai. Lebih mengkhawatirkan dan sungguh buruk, keterlibatan kyai dalam kontestasi politik praktis dapat menyebabkan pembelahan umat karena kyai akan meyuarkan kebenaran versi kandidat dengan memperhatikan margin elektabilitas. Keadaan yang demikian kontraproduktif dengan ekspektasi terhadap sosok kyai. Ruang-ruang politik dalam kerangka demokrasi tentu saja tidak mengharamkan keterlibatan kyai, namun jika ada kyai yang kebetulan memiliki posisi struktural, maka kyai tersebut secara sukarela harus mengundurkan diri.

Idealnya, publik berekspektasi keterlibatan kyai dalam dunia politik akan memberikan kontribusi dan signifikansi positif bagi perbaikan kehidupan masyarakat luas. Kyai sebagai pemegang otoritas keagamaan diharapkan mampu untuk ikut menentukan arah pembangunan yang lebih progresif dan produktif, misalnya memerangi korupsi, mengurangi kemiskinan, mendukung kesetaraan, dan lain-lain. Sebaliknya, jika keterlibatan kyai justru semakin memperkeruh dan memperburuk kualitas hidup masyarakat, maka kehadiran kyai sama dengan para elit politik yang hanya mencari suaka untuk dirinya dan golongannya.

Berdasarkan dua perspektif di atas, ada harapan yang berbeda tentang peran dan fungsi kyai, terutama jika dikaitkan dengan keberpihakannya dalam kontestasi politik. Hal tersebut juga sebagai indikasi bahwa kyai merupakan tokoh yang memiliki dignitas sekaligus dilematis karena kyai berada di area yang mudah dijangkau oleh mata publik. Akibatnya, kyai sangat mudah menuai kecaman publik, dikritik, atau bahkan dikuliti imbas dari keterlibatannya dalam dunia politik.

Kecaman publik yang diarahkan kepada kyai berkaitan dengan problem struktural tentang tatanan politik yang dianggap masih memiliki persoalan. KKN, ketimpangan hukum, oligarki destruktif yang menguasai sumber daya negara dan lain-lain menjadi “warisan” Orde Baru yang masih tersisa di era reformasi. Kyai sebagai tokoh yang secara sosio-kultural mendapatkan kepercayaan dari masyarakat menjadi bagian dari elit politik dianggap masih belum mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

Kyai memiliki kekuasaan. Hal ini berbeda dengan konsep kekuasaan Foucault. Getaran atas pengaruh kekuasaan kyai dapat dirasakan dengan jelas. Inilah yang membuat para politisi menyusun serangkaian strategi, lobi, dan pendekatan dengan tujuan agar kyai dapat mendukung kandidat yang didukung oleh politisi. Restu kyai

merupakan salah satu tiket kesuksesan dalam arena politik. Alhasil, kyai tidak saja sebagai tokoh agama yang menjadi panutan masyarakat, namun juga menjadi tokoh panutan di ranah politik oleh para politisi, sehingga kyai juga berkesempatan menentukan arah bandul politik di daerah yang menjadi basis kekuasaannya. Banyak elit politik yang beranggapan bahwa kyai merupakan mesin politik elektoral yang ampuh sebagai *vote getter*. Akibatnya, kyai memiliki posisi tawar yang kuat untuk membantu elit politik mewujudkan keinginannya, sehingga keberadaannya diperebutkan oleh elit politik.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa wacana yang menyebabkan kyai mendukung Khofifah Indar Parawansa di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 menurut para intelektual antara lain: *Pertama* dukungan kyai kepada Khofifah Indar Parawansa bukan berdasarkan kesadaran untuk memperjuangkan kesetaraan gender, namun berdasarkan kepentingan politik, *Kedua* strategi dan kalkulasi politik kyai yang berbasis pada kesamaan *value*, *Ketiga* patriarkhi masih menjadi dominant discourse, sehingga tidak terjadi diskontinuitas pemikiran meskipun Khofifah Indar Parawansa terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur.

Terpilihnya Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur memunculkan anggapan bahwa telah terjadi kesetaraan gender di ranah politik-keagamaan. Anggapan tersebut ternyata tidak benar. Dukungan kepada Khofifah oleh para kyai lebih bernuansa politis daripada semangat memperjuangkan gender. Bahkan, seruan dan fatwa yang dikeluarkan oleh kyai sebagai pemegang otoritas keagamaan untuk memilih Khofifah tidak dapat dimaknai hanya sebagai seruan keagamaan, namun hal tersebut juga merupakan bagian dari strategi dan kalkulasi politik. *Counter discourse* berupa boleh memilih pemimpin perempuan atas nama Khofifah Indar Parawansa bukan dimaksudkan untuk menggeser *dominant discourse* gender yang patriarkhi, namun hanya demi mewujudkan kepentingan politik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan yaitu: *Pertama*, demokrasi dengan sistem politiknya menantikan ide cerdas dan kemurniaan hati para kyai karena ada banyak masyarakat yang berpatron pada kyai. Kyai sebagai pemegang otoritas keagamaan penting untuk terbuka atas segala hal yang kontekstual terlebih gerakan progresif yang berbasis kesetaraan gender dalam politik, *Kedua*, Pemerintah sebagai pengambil kebijakan perlu untuk terus berkomitmen memberantas segala *injustice* yang menimpa masyarakat, salah satunya adalah

ketidakadilan gender. Pemerintah memiliki tanggung jawab etis dan teknis untuk memajukan demokrasi melalui kebijakan yang pro gender melalui sosialisasi nilai-nilai kesetaraan gender kepada aparatur negara dan masyarakat.

Ketiga, *Vox populi vox Dei*, masyarakat sebagai tuan demokrasi penting untuk tidak mengedepankan sentimen terutama berdasarkan jenis kelamin dalam memilih pemimpin. Kemanusiaan mensyaratkan kesetaraan dan kesetaraan tidak menghendaki ketimpangan gender, *Keempat*, bagi para pelaku politik praktis hendaknya memperhatikan *virtue* dalam politik demi mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Dalil “yang haram dalam politik adalah kalah” perlu segera diakhiri dengan berlaku adil dengan memperjuangkan kesetaraan gender dalam politik, misalnya menjadikan materi kesetaraan gender sebagai salah satu materi pengkaderan partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. 2015. *Islam dan Demokrasi: Respons Intelektual Muslim Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Anam, C. 2010. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Surabaya: Duta Aksara Mulia.
- Anwar, M.H. 2020. *Relasi Kuasa Pengetahuan dalam Pendidikan Jasmani: Sebuah Telaah Arkeo-Genealogi Michel Foucault*. Yogyakarta: UNY Press.
- Anwar, M.H. 2015. Wacana Pendidikan Jasmani di Indonesia dalam Perspektif Arkeo-Genealogi Michel Foucault; Implikasinya dalam Konteks Kekinian. *Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Benda, J. 1980. *The Treason of the Intellectuals*. Terjemahan Richard Aldington. London: Norton.
- Bertens, K. 2006. *Filsafat Barat Kontemporer*. Jakarta: Gramedia.
- Bruineessen, Martin van. 1995. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*. Bandung: Mizan.
- Dhofier, Z. 1982. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Fadli, Yusuf. 2017. “Islam, Perempuan, dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi.” *Jurnal of Government and Civil Society*, 1(1): 43-44.
- Foucault, Michel. 1978. *The History of Sexuality-Volume 1: An Introduction*. New York: Random House.
- Foucault, Michel. 1979. *Dicipline and Punish*. Harmondsworth: Penguin.
- Foucault, Michel. 2002. *Pengetahuan dan Motode (Karya-Karya Penting Foucault)*. Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra.
- Foucault, Michel. 2004. *The Archeology of Knowledge*. London: Routledge.

- Foucault, Michel. 2012. *Arkeologi Pengetahuan*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Foucault, Michel. 2017. *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Yogyakarta: Narasi.
- Harding, Sandra. 1987. *Conclusion: Epistemological Question, Feminist and Methodology: Social Science Issue*. Indianapolis: Indiana University Press.
- Haugaard, Mark. 2012. "Power and Truth." *European Journal of Social Theory*, 15(1): 73-92.
- Hetmanski, Marek. 2018. "Archaeology of Cognitive Science: Michel Foucault's Model of The Cognitive Revolution." *Roczniki Filozoficzne*, 66(3), 8-32.
- Hidayatullah, Panakajaya. 2016. "Alam Pikir Masyarakat Madura yang Terepresentasikan melalui Lagu Ta' Andi Rokok (Cia-Cia)." *Jurnal Kajian Seni*, 2(2): 178-194.
- <https://kampungberita.id/timses-gus-ipul-sesalkan-spanduk-fardu-ain-pilih-khofifah/> (diakses pada 16 Juli 2019)
- <https://m.merdeka.com/peristiwa/mui-pertanyakan-dasar-fatwa-fardhu-ain-pilih-khofifah-di-pilgub-jatim.html> (diakses pada 16 Juli 2019)
- <https://www.google.com/amp/s/pilkada.tempo.co/amp/1024950/cari-pendamping-khofifah-di-pilkada-jawa-timur-kyai-bentuk-tim-9> (diakses pada 16 Juli 2019)
- Jatiningsih, Oksiana. 2016. Dekonstruksi Gender: Analisis Wacana Kritis Foucault tentang Praktik-Praktik Pendidikan Calon Guru di Unesa. *Disertasi*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Jatiningsih, Oksiana. 2020. *Metode Arkeologi Foucault*. Jember: Cerdas Ulet Kreatif.
- Kamahi, Umar. 2017. "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik." *Jurnal Al-Khitabah*, 3(1): 117-133.
- Karpova, Anna Yu, Natalya N. Meshcheryakova, dan Aliona I. Chudinova. (2016). "The political role of intellectuals." *SHS Web of Conference*, 2(8): 1-8.
- Keraf, Alexander Sonny. 2019. *Intelektual Jalan Ketiga*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Liputan 6*, "Kiai NU Jatim Menolak Presiden Wanita" (Jumat, 4 Juni 2004).
- Marhumah, Ema. 2010. *Konstruksi Sosial Gender di Pesantren: Studi Kuasa Kiai atas Wacana Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Martono, Nanang. 2014. *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mudjiyanto, Bambang. 2018. Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 22(1): 65-74.
- Ningrum, Puspita, Ema Damayanti, dan Dede Abdurrahman. (2019). "Meaning of Career as a Reality Contruction in Michel Foucault Perspective." *Journal of Language Education Research*, 2(3): 22-34.
- Prasisko, Yongky. G. 2014. *Blandongan: Perebutan Kuasa Budaya Masyarakat Jawa dan Madura*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Rekonsiliasi dan Integrasi Sosial.
- Priyatno, Joko. 2017. "Wacana, Kuasa dan Agama dalam Kontestasi Pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucault." *Jurnal Thaqafiyat*, 18(2): 186-200.
- Radar Surabaya*, "Kyai Khos Haramkan Mega" (Jumat, 4 Juni 2004)
- Rafni, Al. 2015. "Pembinaan Perempuan Kader Partai oleh Partai Politik dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia" *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, 5(1): 281-286.
- Said, Edward W. 2014. *Peran Intelektual*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sarup, Madan. 2011. *Panduan Pengantar untuk Memahami Poststrukturalisme dan Posmodernisme*. Surabaya: Jalasutra.
- Smart, Barry. 2002. *Michel Foucault (Revised Edition)*. London: Routledge.
- Squires, Judith. 2000. *Gender in Political Theory*. Cambridge: Polity Press.
- Suhaidi, Mohammad dan Sihabuddin. 2020. "Nilai Kearifan Lokal dalam Perilaku Politik Studi Analitis tentang Etika dan Sikap Berpolitik Santri di Madura." *Jurnal Politik Walisongo*, 2 (1): 37-46
- Suryakusuma, Julia. 2012. *Perempuan Indonesia: Dari Patriarkhi Militer-Feodal ke Patriarkhi Islamis-Patrimonial*. Usman Hamid, editor. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Yaqin, Ainul. 2005. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pilar Media.